

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa

Nur Iman Hakim Al Faqih¹, Siti Alfidhatun²

^{1,2}Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
hakimalfaqih02@gmail.com¹, sitialfidhatun231@gmail.com²

ABSTRACT

One of the problems in developing countries is income inequality. Java Island as the center of economic mobility has a different economic structure in each province with the acquisition of the resulting sectoral Gross Regional Domestic Product. This study aims to determine the effect of primary sector GRDP, secondary sector GRDP, tertiary sector GRDP, inflation, and economic growth on income inequality in Java Island for the period 2015-2022. This research uses a quantitative approach with saturated sample technique and uses cross section data of six provinces in Java Island. The data analysis technique used is panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) model. The results of this study indicate that secondary sector GRDP has a negative and significant influence on income inequality. This shows that an increase in secondary sector GRDP can reduce income inequality in Java Island. Inflation has a positive and significant effect on income inequality, which means that an increase in inflation can worsen income inequality. while primary sector GRDP, tertiary sector GRDP, and economic growth have no significant effect on income inequality in the 2015-2022 period in Java Island.

Keywords: Sectoral GRDP, Inflation, Economic Growth, Income Inequality

ABSTRAK

Permasalahan di negara berkembang salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Pulau Jawa sebagai pusat mobilitas ekonomi memiliki struktur ekonomi yang berbeda di setiap provinsi dengan perolehan dari Produk Domestik Regional Bruto sektoral yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2015-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampel jenuh dan menggunakan data cross section enam provinsi di Pulau Jawa. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan yaitu regresi data panel dengan model Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB sektor sekunder memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB sektor sekunder mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti kenaikan inflasi dapat memperparah ketimpangan pendapatan. sementara PDRB sektor primer, PDRB sektor tersier, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada periode 2015-2022 di Pulau Jawa.

Kata Kunci: PDRB Sektoral, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan

PENDAHULUAN

Permasalahan yang umum terjadi di negara sedang berkembang halnya Negara Indonesia adalah yakni ketimpangan pendapatan dan menjadi isu penting dalam pembangunan di suatu negara yang perlu dikendalikan. Ketimpangan pendapatan ini terjadi pada masyarakat dengan pendapatan tinggi dan masyarakat dengan pendapatan rendah. Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam (Julihanza & Khoirudin, 2023), ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan dalam peningkatan kesejahteraan, pola hidup, serta pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh oleh suatu daerah dalam konteks ekonomi, yang mengakibatkan distribusi pembayaran publik yang tidak merata di antara masyarakat.¹

Ukuran ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari rasio gini setiap negara atau daerah. Rasio gini merupakan parameter yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Nilai koefisien rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai koefisien gini semakin tinggi, maka ketimpangan pendapatan tinggi, juga sebaliknya ketika koefisien gini semakin kecil maka tingkat ketimpangan juga semakin rendah. Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan data BPS provinsi dengan ketimpangan sedang yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah. Sementara empat provinsi lain yaitu, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta memiliki ketimpangan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan tertinggi yaitu Provinsi DI Yogyakarta yang mencapai 0,46 pada tahun 2022 dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, rasio gini lima provinsi di Pulau Jawa menempati urutan sepuluh tertinggi di Indonesia. Provinsi DI Yogyakarta sebagai urutan

¹ Agra Julihanza and Rifki Khoirudin, (2023), "Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Sumatera," *Journal of Macroeconomics and Social Development* Vol. 1, No. 2 Hal. 2.

tertinggi dengan rasio gini 0,46 persen. Provinsi dengan tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu DKI Jakarta menempati urutan ketiga dengan rasio gini 0,41 persen. Provinsi Jawa Barat menempati urutan keempat, Provinsi Banten menempati urutan ketujuh dan Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kesepuluh.²

Dalam mengatasi ketimpangan pendapatan yaitu dengan Pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Salah satu keberhasilan dari pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan pemerataan hasil pembangunan terjadi dan mampu menangani kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Namun dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan dapat terjadi pengorbanan salah satunya atau menjadi suatu *trade off* dalam implementasi proses pembangunan. Apabila target yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka masalah pemerataan pendapatan menjadi terabaikan.³

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat mensejahterakan masyarakat secara merata, bahkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat melanggengkan kemiskinan. Berdasarkan data BPS tahun 2022, PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 298.359.970 dan berada di urutan pertama secara nasional dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,25 persen. Tetapi rasio gini atau ketimpangan yang terjadi di provinsi tersebut juga tinggi menempati urutan ketiga sebesar 0,41 persen. Hal ini menunjukkan pendapatan yang tinggi tidak memberikan pemerataan pendapatan terhadap penduduk.

Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan fenomena umum dalam proses pembangunan. Ketimpangan ini bisa juga terjadi karena sumber daya

² Diakses dari: <https://bps.co.id/> pada 8 Agustus 2024.

³ Resha M A Kunenengan, Daisy S M Engka, and Ita Pingkan F Rorong, (2023), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Selatan," Jurnal Berkala Ilmiah Efisien Vol. 23, No. 3, hal. 133 – 134.

alam maupun sumber daya manusia serta kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perkembangan perekonomian seluruh provinsi di Pulau Jawa didukung dengan kontribusi dari semua sektor yang ada wilayah tersebut. Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 2022 PDRB tertinggi yaitu sektor sekunder yang mencakup kegiatan industri dan perdagangan. Sementara keempat provinsi lain, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan DI Yogyakarta kontribusi terbesar PDRB pada sektor tersier yang mencakup kegiatan jasa.

Selain itu faktor yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yaitu adanya inflasi, di mana jumlah pendapatan uang meningkat, namun pertumbuhan produksi barang secara keseluruhan tidak sebanding. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi tanpa diiringi dengan pemerataan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan, serta meningkatnya kesenjangan pendapatan.⁴

Laju inflasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa tergolong rendah karena dibawah 10% selama satu tahun. Tingkat inflasi di Pulau Jawa berkisar antara 1 persen hingga 7 persen. Pada tahun 2022 tingkat inflasi tertinggi sebesar yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar 6,52 persen. Provinsi DIY dengan tingkat ketimpangan tertinggi mengalami inflasi sebesar 6,49 persen, inflasi DKI Jakarta sebesar 4,21 ipersen, Banten sebesar 5,08 persen, Jawa Barat sebesar 6,04 persen dan Jawa Tengah sebesar 5,63 persen. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa provinsi yang mengalami inflasi tinggi dibanding provinsi lain juga diikuti ketimpangan pendapatan tinggi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Nora Herlina dkk., (2022) hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara PDRB sektor primer dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selain itu, penelitiannya ini juga menunjukkan bahwa PDRB sektori sekunder memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap

⁴ Sri Wahyuni and Devi Andriyani, (2022), "Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Vol. 5, No. 1 Hal. 39.

ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun, penelitian ini tidak menemukan bahwa PDRB sektori tersier tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.⁵ Menurut Pieters (2010) dan Khan (1999) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan ada kaitannya dengan struktur pertumbuhan sektoral. Berdasarkan penelitian Suryahadi dengan menggunakan analisis regresi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektoral penting dalam pertumbuhan ekonomi dan memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan berdasarkan daerah perkotaan atau pedesaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rose Gita Cahya Saputri (2017) menunjukkan bahwa produktivitas dari sektor pertanian dan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Saedy Romli menjelaskan bahwa PDRB sektor pertanian mampu mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti melakukan pengujian pengaruh PDRB sektoral, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Pulau Jawa tahun 2015-2022.

KAJIAN LITERATUR

A. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan di negara sedang berkembang di identikkan dengan upaya peningkatan pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita, diharapkan permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat teratasi. Indikator keberhasilan pembangunan daerah dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah perkapita riil. Hal ini berarti tingkat pertumbuhan ekonomi dalam harga konstan harus lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan penduduk.

Paradigma baru dalam pembangunan menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. pembangunan ekonomi tidak lagi menekankan pada pendapatan asli daerah semata sebagai fokus dalam pembangunan, namun

⁵ Dian Nora Herlina et al., (2022), "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Majalah Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* Volume 19, No. 1, Hal. 25-34.

lebih menekankan pada mutu dari proses pengembangannya. Pembangunan ekonomi direalisasikan dengan menghilangkan atau mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.⁶

B. Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznets (1955) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Adapun faktor-faktor dari pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Todaro (2006) yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, serta kemajuan teknologi. Bagi para ekonom, perkembangan teknologi memiliki peran yang lebih signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat membawa peningkatan signifikan dalam nilai tambahan. Kemajuan dalam bidang teknologi mencakup perkembangan dalam metode produksi, penyebaran, dan penggunaan barang dan jasa dengan lebih efektif serta efisien.⁷

C. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu tanda penting untuk memperoleh informasi mengenai keadaan perekonomian di suatu daerah pada waktu tertentu adalah data produk domestik bruto (PDRB) regional, baik dalam harga saat ini maupun harga yang hanya terjadi perubahan sewaktu. Menurut BPS, PDRB pada prinsipnya ialah total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau regional tertentu, atau merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dilakukan oleh seluruh entitas ekonomi. Berdasarkan lapangan usaha, PDRB sektoral dikelompokkan menjadi tiga dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

D. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan suatu peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Menurut teori Keynesian, inflasi bisa terjadi ketika suatu populasi memutuskan hidup diluar kemampuan mereka dengan membeli barang dan jasa dalam jumlah yang berlebihan. Berdasarkan hukum ekonomi, ketika suatu permintaan pada barang dan jasa meningkat dan lebih besar dari penawaran, menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Inflasi menyebabkan kesenjangan antara kelompok

⁶ Mudrajad Kuncoro, (2006), *Ekonomi Pembangunan*, 4th ed. (Yogyakarta: UPP STIMYKPN), Hal. 11.

⁷ Lilis Siti Badriah, (2019) "Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya," *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage* Volume 9, No. 1, Hal. 36.

pendapatan yang berbeda dan mendorong ketimpangan pendapatan semakin cepat.⁸

Inflasi dapat diklasifikasikan dalam empat jenis, yaitu inflasi ringan dengan peningkatan harga barang dan jasa kurang dari 10% selama satu tahun. Kedua inflasi sedang, peningkatan harga barang dan jasa di antara 10%-30% dalam satu tahun. Ketiga inflasi berat, peningkatan harga barang dan jasa pada kisaran 30%-100% dalam setahun. Keempat hiperinflasi, inflasi ini juga disebut dengan inflasi tidak terkendali. Peningkatan harga barang dan jasa pada hiperinflasi melebihi 100% dalam satu tahun.⁹

E. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro dan Smith (2006) dalam (Kunenengan et al., 2023), adanya kesenjangan pendapatan menghasilkan berbagai konsekuensi, di antaranya: tingginya kesenjangan pendapatan dapat mengakibatkan ketidakefisienan dalam sistem ekonomi; kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat merusak keseimbangan dan persatuan sosial; tingginya kesenjangan pendapatan menyebabkan ketidakadilan¹⁰.

Ketimpangan pendapatan muncul akibat perbedaan pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan oleh masyarakat, yang menyebabkan distribusi pendapatan nasional tidak merata di antara mereka. Ketimpangan pendapatan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang bervariasi di antara masyarakat, disebabkan oleh perbedaan lokasi yang berhubungan dengan faktor-faktor produksi dan ketersediaan sumber daya.

Koefisien Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Koefisien yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata, sementara koefisien yang mendekati angka 1 menandakan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Kriteria ketimpangan pendapatan menurut Todaro yaitu: lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi; antara

⁸ Fatimah Azzahra Wairooy and Slamet Haryono, (2023), "Pengaruh Foreign Direct Investment, Inflasi, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dengan Corruption Perception Index Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* Volume 2, No. 1, Hal. 41.

⁹ Fadilla, (2017), "Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional," *Jurnal Islamic Banking* Volume 2, No. 2, Hal. 10.

¹⁰ Kunenengan, Engka, and Rorong, (2023), "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota Di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 23, No. 23, HAL. 136.

0,35 – 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang; dan kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.¹¹

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik atau kuantitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji suatu hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Metode ini digunakan untuk melakukan studi pada sekelompok populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian dan dianalisis secara kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat.¹²

Studi ini menerapkan metode sampling jenuh untuk proses pengambilan sampelnya. Sampel jenuh merupakan sampel yang apabila ditambah jumlahnya tidak akan menambah keterwakilan sehingga tidak akan mempengaruhi nilai informasi yang telah diperoleh. Sampel jenuh juga disebut sebagai sampel yang sudah maksimum, karena ditambah berapapun jumlahnya tidak akan mengubah keterwakilan populasi (Sugiyono, 2018). Sampel dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yaitu data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* dalam penelitian ini yaitu 6 provinsi di Pulau Jawa dan data *time series* yaitu rentang waktu tahun 2015-2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga jumlah data penelitian ini sebanyak 48 data.

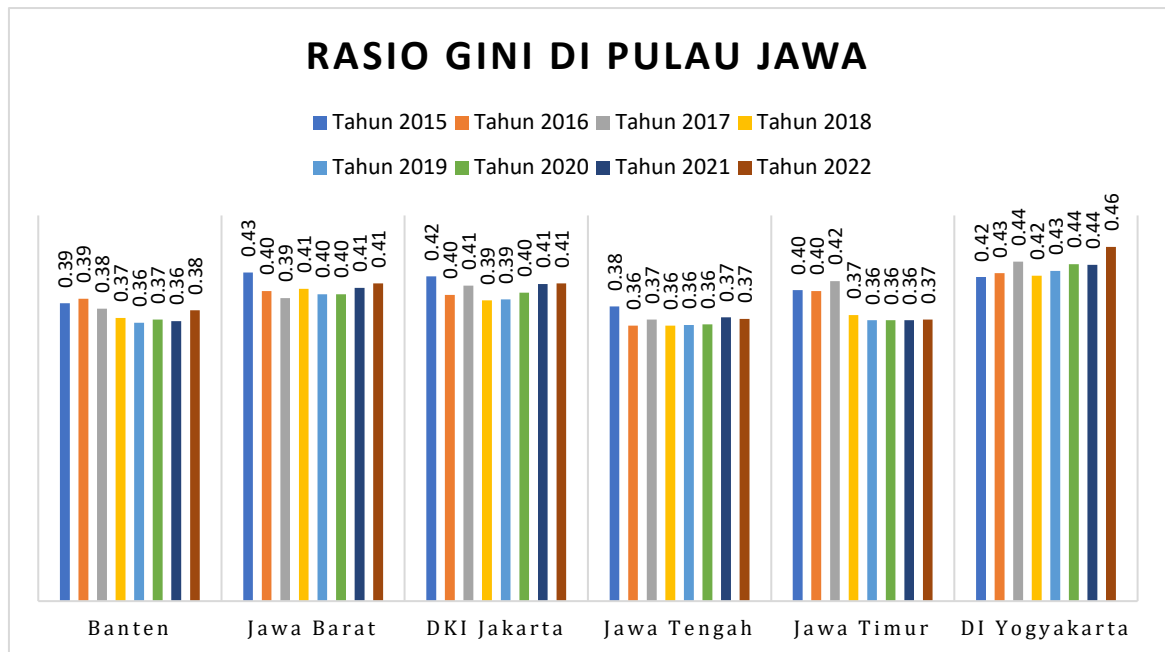
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Berikut diagram ketimpangan pendapatan dengan menggunakan rasio gini di provinsi-provinsi Pulau Jawa periode 2015-2022:

¹¹ Bakhtiar Al and Yunussy Subrata, (2018), "Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Hal. 6.

¹² Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), Hal. 7.



Nilai rasio gini seluruh provinsi di Pulau Jawa berkisar antara 0,36 hingga 0,46. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa sedang. Ketimpangan pendapatan tertinggi dialami oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai rasio gini lebih dari 0,4 selama delapan tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, Provinsi DIY ketimpangan pendapatan mencapai 0,46. Sementara ketimpangan pendapatan terendah yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rasio gini 0,40 di tahun 2022.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Mean	0,39438	92454,31	400465,9	533910,8	3,12167	4,294167
Median	0,395	74450,45	424515,6	449446,8	2,86	5,305
Maximum	0,46	249798,3	816904,9	1504589	6,52	6,59
Minimum	0,36	3901,57	18732,7	56602,83	1,4	-3,39
Std. Deviansi	0,02697	88533,9	243545,4	411103,6	1,26134	2,73518
Skewness	0,34902	0,5277	-0,1395	0,891598	1,01398	-2,0490
Kurtosis	2,20353	1,90262	1,937599	2,88826	3,87026	5,580669
Jarque-Bera	2,24322	4,636222	2,412974	6,384552	9,73991	46,90616
Probability	0,32576	0,098459	0,299247	0,041078	0,00767	0,000000
Observations	48	48	48	48	48	48

Sumber: eviews 12 data diolah

Rata-rata rasio gini di enam provinsi Pulau Jawa sebesar 0,39, PDRB sektor primer sebesar 92.454,31 miliar rupiah, sektor sekunder sebesar 400.465,9 miliar rupiah, sektor tersier sebesar 533.910,8 miliar rupiah, inflasi sebesar 3,12 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,29 persen. Nilai tertinggi dari rasio gini sebesar 0,46, sektor primer sebesar 249.798,3 miliar rupiah, sektor sekunder sebesar 816.904,9 miliar rupiah, sektor tersier sebesar 1.504.589 miliar rupiah, inflasi 6,52 persen, dan pertumbuhan ekonomi 6,59 persen. Nilai terendah rasio gini sebesar 0,36, sektor primer 3.901,57 miliar rupiah, sektor sekunder 18.732,7 miliar rupiah, sektor tersier sebesar 56.602, 83 miliar rupiah, inflasi 1,4 persen, dan pertumbuhan ekonomi sebesar -3,39 persen.

B. Analisis Regresi Data Panel

Peneitian ini menguji tentang analisis pengaruh PDRB sektor primer, PDRB setor sekunder, PDRB sektor tersier, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2015-2022. Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews 12 untuk mendapatkan hasil penelitian.

1. Penentuan Model Estimasi

Penentuan meodel estimasi dapat dilakukan dengan tiga uji yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier-test. Penggunaan uji tersebut bertujuan untuk membantu menentukan model terbaik yang akan digunakan. Berikut hasil untuk uji chow, uji hausman, dan uji LM.

Tabel 2. Hasil Uji Chow dan Hausman

Model Estimasi	Alat Penguji	P-value	Model yang Digunakan
CEM atau FEM	Uji Chow	0.0000	Fixed Effect Model
REM atau FEM	Uji Hausman	0.0000	Fixed Effect Model

Sumber: data diolah dengan eviews 12

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa p-value dari uji chow sebesar $0,00 < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa model yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model. Nilai p-value pada uji hausman menunjukkan nilai $0,00 < 0,05$, maka model yang lebih baik digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil antara uji chow dan uji hasuman menunjukkan model yang sama yaitu Fixed Effect Model, sehingga tidak perlu dilakukan uji Laugrange Multiplier. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pengujian data panel yang paling baik dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Autokolerasi mengindikasikan adanya hubungan antara variabel yang sama dalam waktu atau individu yang berbeda. Uji autokorelasi dapat diuji dengan uji Durbin Watson Test dengan melihat nilai DU atau DL dari jumlah sampel yang digunakan.

Table 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi	
<i>p-value</i>	1,705209

Berdasarkan table 3 nilai $DU > DW > DL$ ($1,7725 > 1,705209 > 1,3167$), sehingga dalam regresi penelitian ini bahwasannya autokorelasi tidak dapat disimpulkan. Untuk dapat lolos uji autokorelasi, maka dilakukan metode penyembuhan atau koreksi dengan menambahkan lag variabel dependen (Y) pada model regresi (Ghozali, 2020).¹³

¹³ Imam Ghozali, (2020), *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika*, 2nd ed. (Semarang: Undip), Hal. 137.

Tabel 4. Uji Autokorelasi Lag 1

Uji Autokorelasi setelah Lag 1	
<i>p-value</i>	1,864932

Berdasarkan table 4 di atas diketahui nilai $DU < DW < 4-DU$ ($1,7814 < 1,8649 < 2,2186$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan ununtuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi antara variable independent dengan variable dependen memiliki distribusi normal atau tidak normal.

Tabel 5. Uji Normalitas

Uji Normalitas	
<i>p-value</i>	0,816

Berdasarkan nilai probability tersebut yaitu $0,816 > a = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribhsi normal dan telah memenuhi syarat normalitas dalam model regresi.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variable independent. Model regresi yang baik yaitu ketika tidak terjadi gejala multikolinier. Jika hubungan antar variabel memiliki nilai koefisien korelasi yang tinggi, yaitu lebih dari 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas. Akan tetapi, jika koefisien korelasi kurang dari 0,9, tidak ada kekhawatiran tentang adanya masalah multikolinearitas.

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

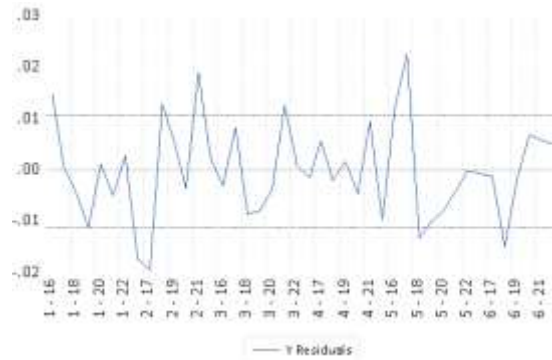
	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1,0000	0,7093	0,0502	0,0607	-0,0480
X2	0,7093	1,0000	0,5198	0,0715	-0,0374
X3	0,0502	0,5198	1,0000	-0,0306	-0,0138
X4	0,0607	0,0715	-0,0306	1,0000	0,5139
X5	-0,0480	0,0374	-0,0138	0,5139	1,0000

Sumber: data diolah dengan evIEWS 12

Hasil output uji multikolinearitas pada table di atas menunjukkan bahwa variable X1 (PDRB sektor primer), X2 (PDRB sektor sekunder), X3 (PDRB sektor tersier), X4 (inflasi), dan X5 (pertumbuhan ekonomi) memiliki nilai koefisien dibawah 0,9. Output ini menerangkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas anatar variable independent dalam data penelitian.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan dalam variasi dan residual antara pengamatan dalam model regresi berganda. Jika residual dan variasi antar pengamatan konsisten, hal itu disebut homoskedastisitas. Namun, jika variasi tersebut bervariasi, maka dinamakan heteroskedastisitas.



Sumber: output eviews 12

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa grafik residual berada diantara 300 dan -200. Grafik tersebut menunjukkan nilai tidak melebihi batas minimal -500 dan batas maksimal 500 pada grafik residual. Sehingga dapat disimpulkan variasi pada model regresi berganda penelitian ini bervariasi atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Data Model FEM

Dari hasil pengujian persamaan menggunakan aplikasi Eviews 12 dapat terlihat hubungan antara variable dependen dan variable independent. Sehingga hubungan dari variable-variabel tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Table 7. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/10/24 Time: 08:27
Sample (adjusted): 2016 2022
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.290551	0.089869	3.233066	0.0030
X1	1.25E-06	8.24E-07	1.511623	0.1411
X2	-2.65E-07	1.07E-07	-2.483320	0.0188
X3	3.19E-08	3.97E-08	0.803024	0.4283
X4	0.004767	0.001663	2.866799	0.0075
X5	-0.000588	0.000818	-0.718176	0.4782
Y(-1)	0.161970	0.173352	0.934346	0.3576

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.884304	Mean dependent var	0.392619
Adjusted R-squared	0.841882	S.D. dependent var	0.027591
S.E. of regression	0.010971	Akaike info criterion	-5.952111
Sum squared resid	0.003611	Schwarz criterion	-5.455634
Log likelihood	136.9943	Hannan-Quinn criter.	-5.770132
F-statistic	20.84552	Durbin-Watson stat	1.864932
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada Tabel 7 di atas, berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi menunjukkan PDRB sektor primer (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,00000125. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan pada PDRB sektor primer tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. PDRB sektor sekunder (X2) berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendataan (Y) dengan nilai koefisien sebesar 0,000000265. Hal ini menunjukkan apabila PDRB sektor sekunder mengalami kenaikan sebesar 1 miliar, maka ketimpangan pendapatan juga akan menurun sebesar 0,0000265 persen dengan asumsi variable lain tetap.

PDRB sektor tersier (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) dengan nilai koefisien 0,0000000319. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan pada PDRB sektor tersier tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Inflasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,004767. Hal ini

berarti Ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, ketimpangan pendapatan juga akan meningkat sebesar 0,48 persen. Pertumbuhan ekonomi (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,161970. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan pada pertumbuhan ekonomi maka tidak akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

4. Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 7 di atas diperoleh hasil regresi dengan nilai R-square sebesar 0,842. Hal ini berarti menjelaskan bahwa 84,2 persen ketimpangan pendapatan (Y) dipengaruhi oleh variable PDRB sektor primer (X1), PDRB sektor sekunder (X2), PDRB sektor tersier (X3), inflasi (X4), dan pertumbuhan ekonomi (X5). Sedangkan 15,8 persen lagi dipengaruhi oleh variable lain di luar model yang digunakan atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaruh PDRB Sektor Primer terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB sektor primer tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahma & Mulyo Hendarto yang menyatakan bahwa PDRB sektor primer di Provinsi DKI Jakarta mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah.¹⁴ PDRB sektor primer yang mencakup pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan karena rendahnya produktivitas pada sektor primer. Sektor primer yang

¹⁴ Binta Azida Fahma and Robertus Mulyo Hendarto, (2022), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta," *Diponegoro Journal of Economics* Volume 11, No. 2 Hal. 78.

lebih padat karya cenderung mengandalkan lebih banyak pekerja dari kalangan keluarga. Dengan banyaknya pekerja keluarga, kemampuan produksi mereka menjadi sangat terbatas.

2. Pengaruh PDRB Sektor Sekunder terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB sektor sekunder berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Udhar yang menyatakan bahwa sektor sekunder berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyerapan tenaga kerja.¹⁵ Hasil ini mendukung teori Kuznets bahwa akan terjadi perubahan pada struktur ekonomi dimana peran sektor ekonomi yang tradisional akan berkurang dan beralih ke sektor modern seperti sektor industry. Perubahan struktural dari sektor primer ke sektor sekunder menyebabkan perbaikan pada ketimpangan pendapatan.

3. Pengaruh PDRB Sektor Tersier terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB sektor tersier tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nora Herlina yang menyatakan bahwa PDRB sektor tersier tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada periode 2010-2020.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang belum tersebar merata di Indonesia. Terutama penduduk di wilayah

¹⁵ Nely Ayu Adriani Udhar, (2020), "The Effect Of The Dynamic Of Economic Sectors To Income Inequality In South Sulawesi," Hal. 29.

¹⁶ Nora Herlina et al., (2022), "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektorial Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19, No. 1, Hal. 33.

pelosok yang belum menerima pembangunan teknologi secara maksimal sehingga sektor tersier tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

4. Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astary yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.¹⁷ Terjadinya peningkatan inflasi menyebabkan harga kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri akan mengalami peningkatan. Inflasi secara umum mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat mengakibatkan berkurangnya barang yang dibeli. Masyarakat dengan penghasilan rendah adalah kelompok yang paling terpengaruh oleh inflasi, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan mereka karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Akibatnya, hal ini dapat memperburuk ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di masyarakat.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Studi yang dilakukan oleh Huh dan Park dalam penelitian Bhagaskara, 2023 mengungkapkan bahwa globalisasi berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama melalui proses integrasi di dalam suatu wilayah. Pengaruh positif ini lebih jelas terlihat di negara-negara dengan

¹⁷ Rima Astary et al., (2024) "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* Volume 10, No. 1, Hal. 113.

pendapatan tinggi. Namun, saat pendapatan mengalami penurunan, pengaruh positif globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang kuat, dan globalisasi juga berhubungan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Peningkatan ketidakmerataan pendapatan ini terutama disebabkan oleh integrasi di luar wilayah. Untuk negara-negara dengan pendapatan rendah, dampak positif globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung lemah, sedangkan ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan yang signifikan.

6. Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga 2022 mencapai 4,3 persen dan PDRB selalu mengalami kenaikan baik di sektor primer, sekunder, dan tersier. Sementara tingkat rasio gini di Pulau Jawa rata-rata selama delapan tahun mencapai 0,39 yang berarti pada tingkat sedang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Pulau Jawa tidak terlalu berpengaruh pada penurunan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa. Tingkat inflasi dari tahun 2015 hingga 2022 mengalami fluktuasi dan rata-rata inflasi di Pulau Jawa sebesar 3,1 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, dan rasio gini di Pulau Jawa menunjukkan masih terjadi ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Umar Chapra menolak adanya konsentrasi kekayaan dan pendapatan hanya pada segelintir individu, serta bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrem dan mengurangi disparitas dalam pendapatan dan kekayaan. Analisis Umar Chapra menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan yang parah di negara-negara berkembang disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan dari sudut pandang strategi

sekuler, baik itu dalam bentuk kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan.

Umar Chapra menekankan pentingnya kesejahteraan dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Prinsip maqashid al-syariah seharusnya memprioritaskan keselamatan jiwa manusia serta memastikan kecukupan kebutuhan pangan dan sandang untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan adalah hak yang harus dipenuhi baik oleh individu maupun kelompok sosial. Pembagian kebutuhan dasar yang diberikan oleh para fuqaha mencakup: kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Hal ini merujuk pada produk dan layanan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu, mengurangi kesulitan, atau memberikan kenyamanan. Pemikiran Umer Chapra tentang strategi pembangunan dalam Islam meliputi beberapa aspek, antara lain peningkatan sumber daya manusia, pengurangan akumulasi atau penumpukan kekayaan di tangan sekelompok orang, restrukturisasi ekonomi, serta perombakan sistem keuangan.

KESIMPULAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB sektor sekunder memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB sektor sekunder mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti kenaikan inflasi dapat memperparah ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sementara PDRB sektor primer, PDRB sektor tersier, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada periode 2015-2022 di Pulau Jawa. Sistem ekonomi Islam menghendaki agar kekayaan benar-benar terdistribusi dengan adil dan merata serta harus beredar di masyarakat,

tidak boleh menumpuk dan dikuasai oleh sekelompok orang. Keadilan distribusi dan upaya dalam meminimalisir kesenjangan sosial dalam ekonomi islam ada dua, yaitu distribusi secara komersial dan melalui mekanisme pasar serta sistem distribusi yang mengedepankan aspek keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. G., & Soesatyo, Y. (2014). Pengaruh Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. *Univestitas Negeri Surabaya*, 2(3), 1–16. <https://core.ac.uk/download/pdf/230752027.pdf>
- Al, B., & Subrata, Y. (2018). Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1–13.
- Amani, Majid, M. S. A. (2022). Analisis Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM EKP)*, 7(3), 152–163.
- Astary, R., Safitri, N., Zarpani, Z., & Harahap, E. F. (2024). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi Dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 10(1), 106–115. <https://doi.org/10.31869/me.v10i1.5293>
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 9(1), 232–248.
- Bhagaskara, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur Pada Tahun 2011-2019. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 827–823. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.10>

- Damanik, A. M., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(1), 15–25. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i1.4533>
- Fadilla. (2017). Perbandingan Teori Inflasi Dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Jurnal Islamic Banking*, 2(2), 1–14.
- Fahma, B. A., & Mulyo Hendarto, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Dki Jakarta. *Diponegoro Journal of Economics*, 11(2), 67. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Firmansyah, U., Junaidi, J., & Achmad, E. (2022). Pengaruh Nilai Tukar Petani, Indeks Pembangunan Manusia Dan PDRB Sektor Pertanian Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Di Wilayah Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 9–14. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v11i1.16777>
- Ghozali, I. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (2nd ed.). Undip.
- Hamdani, M. (2016). Semnas fekon 2016. *Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Agency Theory, 2000*, 50–57.
- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis E-Qien*, 9(2), 196–204.
- Ikhsan, A. K., Ariusni, A., & Putri, D. Z. (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 731. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7700>
- Julihanza, A., & Khoirudin, R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i2.93>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018*, 3, 41–59.

- Kariyasa, K. (2006). Perubahan Struktur Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Serta Kualitas Sumberdaya Manusia Di Indonesia. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 6(1), 1–21.
- Ksatria, I. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektorial Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 82–88. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10263>
- Kunenengan, R. M. A., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 23(3), 133–144.
- Moch. Zainuddin. (2017). Volume 1 Nomor 2 Juli 2017 Volume 1 Nomor 2 Juli 2017. *Istithmar*, 1, 79–85. file:///C:/Users/acer/Downloads/944-2706-1-PB.pdf
- Nora Herlina, D., Adhitya, B., Winarto, H., Kencana, H., & Prabawa, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektorial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Majalah Imiah Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 25–34. <https://doi.org/10.55303/mimb.v19i1.143>
- Patra, I. K. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Kota Palopo. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 192–201. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v4i2.64>
- Putri, N. (2021). VISA : Journal of Visions and Ideas Sekitar VISA : Journal of Visions and Ideas. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 3(3), 464–474.
- Salsabila, N. A., Juliarto, H. K., Syawal, A. F., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel pada Ketimpangan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 2, 241–253. <http://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/860>
- Sirtama, B. W. (2021). *Baiq Wihan Sirtama*. 5(4), 654–664.

- Sugiyono. (2018a). Metode Penelitian Kuantitatif. In Setiyawami (Ed.), *Pt. Global Eksekutif Teknologi* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.); 1st ed.). CV Alfabeta.
- Suryahadi, A., Suryadarma, D., & Sumarto, S. (2006). Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effects of Location and Sectoral Components of Growthfile:///C:/Users/USER/Downloads/1371-4262-1-PB.pdf. In *SMERU Research Institute* (Issue August).
- Sutiono, F., & Syafitri, W. (2018). Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 186–201. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i3.75>
- Sutiono, F., & Syafitri, W. (2019). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.
- Sutiono, F., & Wildan, S. (2019). Indonesian Treasury Review. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105–127.
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34–43. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/59>
- Tri Winarni, D., & Hartono, D. (2023). Dampak Pertumbuhan Sektoral terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis menggunakan Social Accounting Matrix dan Micro-Simulation. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jke.2023.01>
- Udhar, N. A. A. (2020). *The Effect Of The Dynamic Of Economic Sectors To Income Inequality In South Sulawesi*.
- Veronica, A., Ernawati, Rasdiana, Abas, M., Yusriani, Hadawiah, Hidayah, N., Sabtohadhi, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.
- Wahyuni, S., & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan ekonomi Terhadap ketimpangan Pendapatan

- Diprovinsiaceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 5(1), 39.
<https://doi.org/10.29103/jeru.v5i1.7919>
- Wairooy, F. A., & Slamet Haryono. (2023). Pengaruh Foreign Direct Investment, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan Corruption Perception Index sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(1 Juni), 37–50.
<https://doi.org/10.14421/jmes.2023.021-03>
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. In *Buku scan*.
- Widya, I. S., & Priyagus. (2021). Pengaruh PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan serta sektor konstruksi terhadap penyerapan tenaga kerja Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 6(2), 2021.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Winandari, I. M. P., & Rachmawati, L. (2021). Independent: Journal Of Economics E-ISSN: 2798-5008. *Independent: Journal Of Economics*, 1, 55–67.